

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, perihal Kepailitan, 31 Mei 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Materiil Terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 11 September 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perihal Pembatalan Perdamaian, 30 November 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 25 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 15 Juni 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 17 Desember 2020.

Buku

- Ali, Z., 2013, *Metode Penelitian Hukum*. ed.1, cet. 4., Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprita, S., 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, Jember.
- Darmaji, T., 2001, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Grasindo, Jakarta.
- Ginting, E. R., 2020, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, R., 2020, *Hukum Kepailitan*, cet. 5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Irianto, C., 2014, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Qamar, N. dan Syah Rezah, F., 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Sanjaya, U. H., 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, cet. 1, NFP Publishing, Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, M., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Premada Media, Bandung.
- Sembiring, S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan* dalam Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Pustaka Abadi, Jember.
- Sjahdeini, S. R., 2002, *Hukum Kepailitan*, diterjemahkan oleh Fatikasari, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subhan, M. H., 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrum, M., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, Yogyakarta.

Tahir, et. al., 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Yani, A., 2000, *Kepailitan: Seri Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel Jurnal

Ali, H., dan Saputra, F., "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance". *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, no. 3, 2023.

Amalia, W., Hariyansi, I., Prakoso, B., "RESTRUKTURISASI UTANG PT GARUDA INDONESIA, Tbk. SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR". *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6, no. 2, 2022.

Andriansyah. "Restatement Asas *Going Concern* melalui Pengaturan Debt Threshold sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, no. 5, 2022.

Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., Yuanitasari, D., "Perjanjian Perdamaian Sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang Dalam PKPU," *Journal of Comprehensive Science*, 2, no. 6, 2023.

Aprita, S., "Asas Kelangsungan Usaha sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17, no. 2, 2018.

As'ari, H., Pabulo, A. M., Zaman, B., "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4, no. 3, 2019.

Cindarbumi, B. P., Suryamah, A., "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal USM Law Review*, 5, no. 2, 2022.

Damayanti, R., Pasaribu, P. S. I., Suryanti, N., Yuanitasari, D., "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban

- Pembayaran Utang untuk Mencegah Pailit”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4, no. 2, 2023.
- Dewi, P. E. T. dan Mantili, R., "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice*, 6, no. 1, 2021.
- Eka, I., "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23 no. 2, 2020.
- Eka, W. dan Kuntadi, C., “Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Opini Audit *Going Concern* (Literature Review).” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4, no. 1, 2022.
- Fatahillah, F. dan Winanti, A., "Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, 6, no. 3, 2023.
- Febrina, H. dan Tewu, M. L., "Resiko Sistem Manajemen Kinerja yang Buruk Terhadap Perusahaan Start Up di Indonesia". *Jurnal Manajemen Risiko*, 3, no. 2, 2023.
- Fiddaniah, D. dan Suryono, A., “Penerapan Pelaksanaan *Going Concern* Oleh Tim Kurator PT Star Prima (Dalam Pailit)”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, no. 2, 2024.
- Ginting, S. dan Tarihoran, A., "Faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan *going concern*." *Jurnal wira ekonomi mikroskil*, 7, no. 1, 2017.
- Hadiwidjojo dan Komandoko, K., "Metode Dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik Dan Non Publik." *Jurnal Hukum & Pasar Modal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)*, 7, no. 2, 2016.
- Harahap, I. dan Pratiwi, R., "Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3, no. 1, 2023.
- Harsono, I. dan Prananingtyas, P., "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer". *Notarius*, 12, no. 2, 2025.
- Humaira, I. dan Ansari, I., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hakim Pengawas dalam Kepailitan dan PKPU". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6, no. 3, 2022.

- Idham, I., Nawi, S. Baharuddin, H., "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt. Sus-Pkpu. Pailit/2018/Pn. Niaga Mks." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1, no. 5, 2020.
- Irianto, C., "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4, no. 3, 2015.
- Irwanda dan Seliam, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Mavisha: Law and Society Journal*, 1, no. 1, 2024.
- Jinaratana, A., dan Adam, R. C., "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7, no. 2, 2024.
- Jumady, E. dan Fajriah, Y., "Green Supply Chain Management: Mediasi Daya Saing dan Kinerja Perusahaan Manufaktur". *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 8, no. 1, 2020.
- Kenting, Y. A. dan Parulian, H. D., "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5, no. 2, 2022.
- Kheriah., "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 2, 2013.
- Kiemas, A., Juan, M., Gunadi, A., "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution," *Rechtsidee*, 11, no. 2, 2023.
- Manangi dan Wicaksana, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Business Going Concern) dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia: Application of the Business Going Concern Principle in the Indonesian Bankruptcy Law System." *Amicus Curiae*, 1, no. 2, 2024.
- Mantili, R., Dewi, P. E. T., "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Jurnal Aktual Justice*, 6, no. 1, 2021.
- Narassati, D. A., Pamungkas, Y. A., Afriana, A., "Disparitas Putusan Pengadilan tentang Permohonan Pailit dan PKPU oleh Kreditor terhadap BUMN (Persero)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, no. 5, 2023.

- Nurin, A. "Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)". *Jurist-Diction*, 3, no. 4, 2020.
- Pritana, H., "Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Rasio Profitabilitas". *Akurat / Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unibba*, 7, no. 2, 2016.
- Razak, N., Aprianto, R., Rinaldi, R. A., & Meiden, C., "Kajian Literatur Faktor yang Banyak Mempengaruhi Opini Audit Going Concern," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2, no. 1, 2022.
- Rizki, S., Bilal, M., Gandakusuma, I., "Analysis of Company Bankruptcy Potential During the COVID-19 Pandemic: A Study of the Transportation and Health Sector in Indonesia in 2020-2021." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4, no. 8, 2023.
- Ruma, et. al., "Pelatihan Teknik Proyeksi Bisnis pada Kelompok Usaha Batu Bata di Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3, no. 4, 2023.
- Rusydy, N. dan Djuanda, G. "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN." *Seniman Transactions*, 1, no. 1, 2019.
- Saija, R. dan Sudiarawan, K. A., "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, 2, no. 1, 2021.
- Simalango, M., "Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 15, no. 1, 2017.
- Simanjuntak, J., "Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Honeste Vivere*, 33, no. 1, 2023.
- Sutra, H. dan Gomes, D., "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9, no. 1, 2021.
- Yordinand, Purba, H., Harianto, D., "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714 K/Pdt. Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt. Sus-Pailit/2022/Pn Niaga. Jkt. Pusat)," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5, no. 7, 2024.
- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P, Widyantara, I. M. M., "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3, no. 1, 2022.

Ziyad, A., "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya," *Banua Law Review*, 3, no. 2, 2021.

Hasil Penelitian

Hanifah, D. L., 2021, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asas Going Concern oleh Kurator Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Telah Dinyatakan Pailit*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Kumala, A., 2019, *KAJIAN EMPIRIS RESTRUKTURISASI KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PT.GARUDA INDONESIA Tbk.*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.

Syahidah, E. dan Sulistiowati, 2017, *Pelaksanaan Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Dalam Kepailitan PT Benangsari Indahtexindo*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Verry, S., 2019, *Hak Kreditor Separatis yang Kalah dalam Pemungutan Suara pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hasil Wawancara

Muhammad Anshar Majid, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara Pribadi, Semarang, 13 Februari 2025.

Laporan Publik

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2024. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024, Volume 42, Tahun 2024, Nomor Katalog 9199007. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/20/3f6dbcd515737b5c8e40d497/laporan-perekonomian-indonesia-2024.html>.

Dun & Bradstreet. 2024. Annual Report Global Bankruptcy Report 2023, Amerika Serikat: Dun & Bradstreet,
[https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/economic-and-industry-insight/2023 Global %20Bankruptcy Report.pdf](https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/economic-and-industry-insight/2023%20Bankruptcy%20Report.pdf)

Internet

Hukumonline. "Akibat Hukum Jika Debitur Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitur-lalai-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt612f7edd2b2c8/> (diakses 23 Februari 2025).

Hukumonline. "Asas Business *Going Concern* dalam Kepailitan dan PKPU", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86/> (diakses 15 Januari 2025).

Hukumonline. "Bolehkah Mengubah Perjanjian Perdamaian Setelah Homologasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-perjanjian-perdamaian-setelah-homologasi-lt64abbd3357733/> (diakses 19 Februari 2025).

Hukumonline. "Cara Bagi Harta Pailit Menurut Asas Pari Passu Prorata Parte", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-bagi-harta-pailit-menurut-asas-ipari-passu-prorata-parte-i-lt6170bf63c34bc/> (diakses 8 Februari 2025).

Hukumonline. "Catat 11 Asas Kepailitan yang Harus Kamu Tahu", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-11-asas-kepailitan-yang-harus-kamu-tahu-lt63d0e51c80e96/> (diakses 22 Februari 2025).

Hukumonline. "Efektivitas PKPU Dalam Mencegah Kepailitan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/efektivitas-pkpu-dalam-mencegah-kepailitan-lt588ea6dd25fd7/> (diakses 19 Februari 2025).

Hukumonline. "Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Proses PKPU dan Kepailitan" <https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-proses-pkpu-dan-kepailitan-lt655da93659ac7/> (diakses 19 Februari 2025).

Hukumonline. "Kewenangan Hakim Pengawas Dalam PKPU dan Kepailitan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-hakim-pengawas-dalam-pkpu-dan-kepailitan-lt621f1b4a461f1/> (diakses 15 Februari 2025).

Hukumonline. "Menentukan Bunga dan Denda Dalam Wanprestasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi-lt52468fd316384/> (diakses 21 Februari 2025).

Hukumonline. "Mengenal Mekanisme PKPU Dalam Restrukturisasi Utang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-pkpu-dalam-restrukturisasi-utang-lt66f604920450e/> (diakses 8 Februari 2025).

Hukumonline. "Tujuan dan Proses PKPU", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-1t627cc094029be/> (diakses 16 Februari 2025).

Hukumonline. "Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolaknya Perdamaian" <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pasca-ditolaknya-perdamaian-1t6057ff8248ddc/> (diakses 19 Februari 2025).

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. "Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19". <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19> (diakses 20 Desember 2024).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> (diakses 20 Desember 2024).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Perusahaan Pailit, Pembayaran Upah Buruh Harus Didahulukan", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10193> (diakses 8 Februari 2025).

PT Bursa Efek Indonesia. "Permintaan Penjelasan Bursa" https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENT_STOCK/From_EREP/202106/ae3f0cca56_5632e24ddf.pdf (diakses 30 Maret 2025).

SIP Law Firm. "Going Concern Sebagai Upaya Kelangsungan Usaha Debitor Pailit", <https://siplawfirm.id/going-concern/?lang=id> (diakses 21 Februari 2025).

SIP Law Firm. "Inilah Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas", <https://siplawfirm.id/inilah-tugas-dan-wewenang-hakim-pengawas/?lang=id> (diakses 20 Februari 2025).

SIP Law Firm. "Mengenal Jenis-Jenis Kreditur Dalam Perkara Kepailitan", <https://siplawfirm.id/mengenal-jenis-jenis-kreditur-dalam-perkara-kepailitan/?lang=id> (diakses 8 Februari 2025).

SIP Law Firm. "Perlindungan Hukum Kreditor", <https://siplawfirm.id/perlindungan-hukum-kreditor/?lang=id> (diakses 21 Februari 2025).